SALINAN

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 160 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I. PENDAHULUAN;
b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
d. BAB IV. PENUTUP.

(3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.

(2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

(3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1500

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

a. Perubahan Renja Bapelitbangda Tahun 2024 mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaas dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026; dan
b. Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2024 menjadi pedoman Bapelitbangda dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bapelitbangda Tahun 2024 .

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Bapelitbangda dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri dan Sistem Monitoring, Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan (Semenanjung) Kota Batam;
b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
c. Meningkatkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

PERUBAHAN RENJA 2024

BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) untuk Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, dokumen Perubahan Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bapelitbangda dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bapelitbangda dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Akhir kata, semoga perubahan renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Batam.

Batam, 26 Juli 2024
Kepala Badan Perencaanaan dan
Penelitian Pengembangan
Pembangunan Daerah

Dahlina Nopilawati, S.T
Pembina Tk.I
NIP. 19751121 200212 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRWIULAN II TAHUN 2024 7

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

3.1 Perubahan Belanja Perangkat Daerah 26

3. 2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 47

BAB IV PENUTUP 69

5.1 Catatan Penting 69

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 69

5.3 Rencana Tindak Lanjut 70

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024 Kota Batam 9

TABEL 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Kota Batam..... 26

TABEL 3.1. Program dan Kegiatan dari Perangkat Daerah Tahun 2024 sebelum dan sesudah perubahan 32

TABEL 3.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024..... 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perubahan Rencana Kerja Bapelibangda Kota Batam merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Bapelitbangda Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2024 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024.Dalam perjalanan kegiatan terdapat dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan berdasarkan dari hasil evaluasi triwulan II tahun berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan dan keadaan yang mendasar yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Batam

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang, hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,tambahan lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor121);

8. Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1072);
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1159).
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1424);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024;
2. sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bapelitbangda Tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
3. sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2024;
4. sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Recana kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain:

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2024, antara lain: evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024, capaian Renstra perangkat daerah, **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja Bapelitbangda tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja PD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Bapelitbangda sampai pada triwulan II tahun 2024, serta sebagai sarana perbaikan kinerja Bapelitbangda pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaran program dan kegiatan Bapelitbangda Kota Batam Tahun Anggaran 2024. Sesuai APBD Tahun Anggaran 2024, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp.17.652.097.070,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 17.387.086.070,- dengan uraian sebagai berikut:
   a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 12.958.083.374,-
   b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 4.429.002.696,-
2. Belanja Modal sebesar Rp.265.011.00,-

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Bapelitbangda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Sedangkan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, seperti belanja mebeleur dan komputer.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBD TA. 2024 terdiri dari 4 program, 15

kegiatan dan 35 sub kegiatan. Hasil pencapaian kinerja Renja dan Renstra Bapelitbangda Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
2	3	4	5	6
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
PERENCANAAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	**50.00%**	50
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan**	100%	33.33%	33.33
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 Laporan	100

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	100%	114.89%	114.89
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang	**55 orang**	114.9
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 dokumen	0	0
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	100%	1.82%	1.82
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 orang	1	1.82
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	50.00%	50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	7	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4	100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**12 laporan**	6	50
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	100%	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	0	0
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	100%	50.00%	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1	50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	6	50
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	100%	50.00%	50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7	100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	3	7.3
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	98%	99.03	
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan**	100%	0	0
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	43 berita acara	43	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 berita acara	**2**	100
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	0	0
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah**	100%	100	100
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	190 orang	0	0

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan**	100%	41.9	41.9
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan	1	33.33
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu**	100%	100	100
	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100	100
	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100	100
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	15 PD	15	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 dokumen	13	20.6
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	0	0

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	42 dokumen	7	16.7
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	0	0
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah Perangkat Daerah Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	10 PD	10	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	49 dokumen	21	42.9
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 laporan	0	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	21 dokumen	9	42.9
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 laporan	0	0
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	18 PD	18	100

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	35 dokumen	15	42.9
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 laporan	4	80
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	91 dokumen	39	42.9
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	13 laporan	5	38.5
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief**	50%	**0**	0
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/difasilitasi**	1 dokumen	0	0
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 laporan	0	0
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Indeks inovasi daerah**	54 nilai	0	0

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 laporan	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda

Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, Bapelitbangda Kota Batam sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state).

Untuk mencapai visi dan misi, Bapelitbangda Kota Batam melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Batam merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bapelitbangda dengan program tingkat Kota Batam menjadi mutlak.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bapelitbangda melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu:

1. fungsi perencanaan; dan
2. fungsi penelitian dan pengembangan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2022, Bapelitbangda Kota Batam didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, dan ketersediaan anggaran. Kinerja pelayanan Bapelitbangda Kota Batam yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan fokus pada :

1. perumusan kebijakan
2. bimbingan
3. konsultasi dan koordinasi
4. monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
5. penyusunan kajian/penelitian.

Sesuai dengan kewenangan di atas, secara umum jenis pelayanan berdasarkan output yang diberikan oleh Bapelitbangda terdiri dari:

1. Pelayanan penyusunan dokumen RPJPD
2. Pelayanan penyusunan dokumen RPJMD
3. Pelayanan penyusunan dokumen RKPD
4. Pelayanan penyusunan dokumen Renstra
5. Pelayanan penyusunan dokumen Renja
6. Pelayanan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan
7. Pelayanan kelitbangan

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bapelitbangda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kota, maupun horizontal yakni antar PD;
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi, data dan informasi pembangunan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bapelitbangda, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah :

1. Unsur Pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program;

3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan;
4. Masyarakat dalam hal penyediaan informasi perencanaan pembangunan;

Tabel 2. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pemikiran strategis di bidang perencanaan	Unsur Pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda)
2.	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi	Perangkat Daerah
3.	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
4.	Penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)

Pengukuran kinerja pelayanan Bapelitbangda dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarakan rencana kegiatan tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu juga untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbangda sampai dengan Triwulan II
Kota Batam

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SPM/STANDAR NASONAL	IKK	TARGET RENSTRA BAPELITBANGDA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja			24.05	25.00	25.50	26.00	22.46	23.11	25.50	26.00	
2	Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan			71%	80%	85%	91%	73%	82.3%	85%	91%	
3	Persentase policy brief yang diimplementasikan / ditindaklanjuti			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
4	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan			89%	90%	91%	93%	100%	90%	91%	93%	
5	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			96%	98%	98%	98%	98.00%	98%	98%	98%	
6	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

8	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief			50%	50%	50%	100%	50%	50%	50%	50%	
10	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbangda

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bapelitbangda Kota Batam memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan melalui strategi operasional yang diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bapelitbangda Kota Batam.

Untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Sedangkan rumusan kebijakan dalam konteks organisasional Bapelitbangda Kota Batam mengacu pada Renstra Bapelitbangda Kota Batam yang tidak terlepas dari RPJMD Kota Batam. Adapun strategi Bapelitbangda Kota Batam untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bapelitbangda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai;
2. Membangun dan mengembangkan mekanisme perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan sistem evaluasi perencanaan pembangunan (SEPP);
3. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel;
5. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bapelitbangda;

6. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
7. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan urusan kewenangan yang ada;
8. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum terbentuk;
9. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan;
10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan; dan
11. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW.

Selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda pada kurun periode Renstra 2021-2026, khususnya pada Tahun Anggaran 2022, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Batam mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif, yang didukung dengan aplikasi e-planning pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Batam, sehingga dapat tercipta konsistensi dan sinkronisasi yang lebih baik antara usulan masyarakat dan prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam;
2. Tersedianya aplikasi evaluasi dokumen perencanaan (SEPP);
3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan PD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Adapun beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah. Kebijakan pemerintah pusat yang sangat dinamis dikarenakan seringnya perubahan peraturan perundang-undangan terkadang kurang tersosialisasai secara baik di tingkat daerah, kondisi ini mengakibatkan kurangnya pemahaman aparatur yang mengakibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tidak optimal
2. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan kurangnya pelaksanaan bimtek/workshop penyusunan perencanaan dan adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Kuantitas dan kualitas aparatur memegang peranan penting untuk melaksanakan tugas perencanaan.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan belum optimalnya koordinasi dan singkronisasi tiap-tiap aparatur perencana di lingkungan Pemerintah Kota Batam akan berpotensi menimbulkan permasalahan dan kendala dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan.
4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat.
   Ketersediaan sistem data dan informasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi serta memonitoring perencanaan yang sedang dijalankan. Adanya sistem informasi dan data yang akurat akan mempermudah aparatur perencana pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam perkembangan Bapelitbangda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapelitbangda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas

perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Belanja Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Bapelitbangda Kota Batam **naik** dari APBD Kota Batam Tahun 2024 yang semula sebesar Rp.17.652.097.070,- pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 menjadi Rp. 17.764.208.301 ,- atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 112.111.231,-. Hal ini disebabkan karena penyesuaian gaji dan tunjangan PNS serta penganggaran untuk tambahan PPPK dan penyediaan sarana prasarana perkantoran.

Disamping kenaikan belanja ada juga penurunan beberapa sub kegiatan, antara lain turun untuk pada anggaran honorarium, tenaga ahli, belanja makanan dan minuman rapat, atk dan-lain-lain.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 15.209.620.070,00,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 15.624.576.301,- atau naik sebesar Rp. 414.956.231,-.

I.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp.150.710.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 138.810.000,- atau naik sebesar 11.900.000,-

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 25.835.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.0,- atau turun sebesar Rp. 25.835.000,- Pengurangan pada sub kegiatan ini dalam rangka efisiensi anggaran, dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja, yaitu tersusunnya dokumen Renja Bapelitbangta Tahun 2025 dan Perubahan Renja Bapelitbangda Tahun 2024.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 150.710.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp.138.810.000,- atau turun sebesar Rp.11.900.000,- Pengurangan disebabkan oleh perubahan belanja, dari sebelumnya honorarium Tenaga Ahli dialihkan menjadi anggaran belanja bimtek akuntabilitas kinerja Bapelitbangda, sehingga terjadi selisih anggaran yang tidak digunakan.

I.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp.12.958.083.374,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp.13.294.326.221,- atau naik sebesar Rp.336.242.847,-

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 12.958.083.374,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp.13.294.326.221,- atau naik sebesar Rp.336.242.847,- Penyesuaian dengan penambahan kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK yang dianggarkan sebelumnya 47 orang menjadi 55 Orang selisih 8 Orang.

I.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 1.370.145.100,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp 1.512.327.100,- atau naik sebesar Rp. 142.182.000,-

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp.447.919.500,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 459.037.500,- atau naik sebesar Rp.11.118.000,- Penambahan anggaran belanja pada sub kegiatan ini antara lain di rencanakan untuk pembelian: pendingin ruangan dan perlengkapan kearsipan, seperti: guide, map gantung dan box arsip.

2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp.742.844.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp.873.908.000,- atau naik sebesar Rp.131.064.000,-

I.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 142.066.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp 160.701.000,- atau naik sebesar Rp.18.635.000,-

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 142.066.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp 160.701.000,- atau naik sebesar Rp.18.635.000,-

I.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 87.014.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp 64.684.000,- atau turun sebesar Rp. 22.330.000,- Terdiri dari:

1. Pengadaan Mebel

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 142.066.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp 160.701.000,- atau naik sebesar Rp.18.635.000,-

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 2.016.805.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang

menjadi Rp. 1.717.615.000,- atau turun sebesar Rp. 299.190.000,-

II.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 1.588.306.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp 1.325.888.000,- atau berkurang sebesar Rp. 262.418.000,- Terdiri dari:

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 234.076.500,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 225.224.500,- atau turun sebesar Rp. 8.852.000,-
2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 82.538.500,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 72.017.500 ,- atau turun sebesar Rp. 10.521.000,-
3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 735.147.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 557.102.000,- atau turun sebesar Rp. 178.045.000,-
4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 536.544.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 471.544.000,- atau turun sebesar Rp. 65.000.000,-

II.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 214.294.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 177.522.000,- atau turun sebesar Rp. 36.772.000,- Terdiri dari:

1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 214.294.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 177.522.000,- atau turun sebesar Rp. 36.772.000,-

IV. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBNAGUNAN DAERAH

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 122.519.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 118.864.000,- atau turun sebesar Rp. 3.655.000,-

IV.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 27.052.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 24.647.000,- atau turun sebesar Rp. 2.405.000,-

1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 3.335.000 ,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 2.980.000,- atau turun sebesar Rp. 355.000,-

2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 13.288.000 ,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 11.238.000,- atau turun sebesar Rp. 2.050.000,-

IV.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 30.764.000 ,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 29.514.000,- atau turun sebesar Rp. 1.250.000,- Terdiri dari:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 8.055.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 7.340.000,- atau turun sebesar Rp. 715.000,-
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
   Semula anggaran murni Tahun 2024 sebesar Rp. 7.641.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 7.106.000,- atau turun sebesar Rp. 535.000,-

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024,
SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2		3	4				
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**20,842,101,566.00**	**17,764,208,301.00**	
	PERENCANAAN	**PERENCANAAN**				**20,495,997,566.00**	**17,461,055,301.00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**18,006,868,036.00**	**15,624,576,301.00**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan**	**100%**	**100%**	**176,545,000.00**	**138,810,000.00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	25,835,000.00	0	Refocusing anggaran

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	150,710,000.00	138,810,000.00	Rencana pembangunan aplikasi kinerja internal di tunda karena akan digabungkan kedalam rencana pengembangan aplikasi Semenanjung. Selanjutnya anggaran belanja aplikasi kinerja internal diubah menjadi belanja bimtek akuntabilitas dilingkungan Bapelitbangda.
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**13,399,310,108.00**	**13,294,326,221.00**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang	55 orang	13,354,870,108.00	13,294,326,221.00	Penyesuaian dengan penambahan kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK yang dianggarkan sebelumnya 47 orang menjadi 55 Orang selisih 8 Orang

						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 dokumen	0	44,440,000.00	0	Sub kegiatan ini sudah di hold di tahapan APBD 2024
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**845,654,600.00**	**160,701,000.00**	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	88,080,000.00	0	Sub kegiatan ini sudah di hold di tahapan APBD 2024
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 orang	20 orang	757,574,600.00	160,701,000.00	Penambahan anggaran belanja Pendidikan Pelatihan untuk Peningkatan SDM Pegawai Bapelitbangda
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**2,324,513,100.00**	**1,512,327,100.00**	

						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	17,300,000.00	17,300,000.00	-
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	9 paket	447,919,500.00	459,037,500.00	Penambahan anggaran belanja perlengkapan kantor a.l: di AC SPLIT, Guide, map gantung, box Arsip, kaca anti panas
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	92,071,000.00	62,236,000.00	-
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	54,345,600.00	99,845,600.00	-
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	1,712,877,000.00	873,908,000.00	Penambahan anggaran belanja koordinasi dan konsultasi

						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**89,922,000.00**	**64,684,000.00**	
						Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	89,922,000.00	64,684,000.00	Pengurangan anggaran belanja kursi
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**543,154,528.00**	**238,713,980.00**	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	12 laporan	64,590,000.00	2,400,300.00	-
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	478,564,528.00	236,313,680.00	Pengurangan digaji THL karena lulus PPPK sebanyak 1 orang
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi undefined**	**100%**	**100%**	**627,768,700.00**	**215,014,000.00**	

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	38,280,000.00	38,280,000.00	-
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	246,786,000.00	140,250,000.00	-
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	41 unit	33,680,000.00	36,484,000.00	Penambahan anggaran belanja Pemeliharaan TV dan Proyektor
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	309,022,700.00	0	Sub kegiatan ini sudah di hold di tahapan APBD 2024
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**98%**	**98%**	**2,234,360,000.00**	**1,717,615,000.00**	

						Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan**	**100%**	**100%**	**1,805,861,000.00**	**1,325,888,000.00**	
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen	1 dokumen	234,076,500.00	225,224,500.00	
						Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	43 berita acara	43 berita acara	197,110,500	72,017,500.00	Pengurangan di Kosumsi Rapat dan Photo Copy
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	2 berita acara	735147000	557,102,000.00	
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	639527000	471,544,000.00	Pengurangan di pelaksanaan Musrenbang RPJPD semula dilaksanakan dihotel dialihkan ke lantai IV Pemko Batam karena pelaksanakan kegiatan pada bulan Puasa (Ramadhan)

						Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah**	**100%**	**100%**	**214,294,000**	**177,522,000.00**	
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	190 orang	450 orang	214,294,000	177,522,000.00	Penyesuaian dari Honor Tenaga Ahli aplikasi Semenanjung menjadi anggaran belanja Bimtek SEPAKAT (Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Reksosek Terpadu) untuk semua OPD sekota Batam
						Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan**	**100%**	**100%**	**214,205,000**	**214,205,000.00**	

						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan	3 laporan	214,205,000	214,205,000.00	-
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**84,959,530**	**64,703,000.00**	
								Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			46,272,000	**24,647,000.00**	

								Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			123,538,000	**29,514,000.00**	
						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	**15 PD**	**15 PD**	**84,959,530**	**64,703,000.00**	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 dokumen	63 dokumen	19,510,030	16,213,000.00	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	3,364,000	3,364,000.00	

						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	42 dokumen	42 dokumen	18,528,500	11,576,000.00	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	43,557,000	33,550,000.00	
						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Perangkat Daerah Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	**10 PD**	**10 PD**	**46,272,000**	**24,647,000.00**	

						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	49 dokumen	49 dokumen	5,610,000	2,855,000.00	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 laporan	7 laporan	19,800,000	2,980,000.00	Pengurangan dibelanja ATK
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	21 dokumen	21 dokumen	13,288,000	11,238,000.00	Pengurangan dikosumsi Rapat
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 laporan	3 laporan	7574000	7,574,000.00	

						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	**18 PD**	**18 PD**	**123,538,000**	**29,514,000.00**	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	35 dokumen	35 dokumen	34,322,000	7,728,000.00	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 laporan	5 laporan	24,231,000	7,340,000.00	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	91 dokumen	91 dokumen	32,353,000	7,340,000.00	Pengurangan dibelanja ATK

						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	13 laporan	13 laporan	32632000	7,106,000.00	Pengurangan dibelanja ATK
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**346,104,000**	**303,153,000.00**	
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief**	**50%**	**50%**	**346,104,000**	**303,153,000.00**	
						Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/difasilitasi**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**16,792,000**	**7,141,000.00**	
						Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 laporan	1 laporan	16,792,000	7,141,000.00	

						Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Indeks inovasi daerah**	**54 nilai**	**54 nilai**	**329,312,000**	**296,012,000.00**	
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 laporan	1 laporan	329,312,000	296,012,000.00	

3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bapelitbangda merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi: fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut telah ditetapkan program/kegiatan. Adapun prioritas program Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota

Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan bahan Logistik Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : 4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Pengadaan Mebel

Kegiatan : 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya daya air dan listrik
- Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor

Kegiatan : 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program : 2. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/Kota
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Kegiatan : 3. Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Program : **3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kegiatan : 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Koordinasi Pelaksananaa Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Kegiatan : 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Koordinasi Pelaksananaa Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Kegiatan : 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Koordinasi Pelaksananaa Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Program : 4. Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan
   - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aratur dan Reformasi birokrasi
2. Pengembangan dan Inovasi Daerah
   - Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Tabel 3.2
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan		Pagu		Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		INDIKATOR	TARGET	PAGU
1	2	3	4							
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				20,842,101,566.00	17,764,208,301.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			19,822,702,553.00
	PERENCANAAN				20,495,997,566.00	17,461,055,301.00	PERENCANAAN			19,536,112,553.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	18,006,868,036.00	15,624,576,301.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	16,832,937,553.00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	100%	176,545,000.00	138,810,000.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	128,712,000.00

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	25,835,000.00	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	128,712,000.00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	150,710,000.00	138,810,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**13,399,310,108.00**	**13,294,326,221.00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**12,828,479,017.00**
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang	55 orang	13,354,870,108.00	13,294,326,221.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	12,828,479,017.00

						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 dokumen	0	44,440,000.00	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**845,654,600.00**	**160,701,000.00**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**119,448,000.00**
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	88,080,000.00	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 orang	20 orang	757,574,600.00	160,701,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	119,448,000.00
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**2,324,513,100.00**	**1,512,327,100.00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,593,527,000.00**

						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	17,300,000.00	17,300,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15,625,000.00
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	9 paket	447,919,500.00	459,037,500.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	786,705,000.00
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	92,071,000.00	62,236,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	64,911,000.00
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	54,345,600.00	99,845,600.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	96,630,000.00
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	1,712,877,000.00	873,908,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	629,656,000.00

						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**89,922,000.00**	**64,684,000.00**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**1,052,176,000.00**
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	89,922,000.00	64,684,000.00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	41,565,000.00
												Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	634,886,000.00
												Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	375,725,000.00

						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**543,154,528.00**	**238,713,980.00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**85,483,536.00**
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	64,590,000.00	2,400,300.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	1,620,000.00
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	478,564,528.00	236,313,680.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	83,863,536.00
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi undefined**	**100%**	**100%**	**627,768,700.00**	**215,014,000.00**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi undefined**	**100%**	**1,025,112,000.00**

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	38,280,000.00	38,280,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	44,640,000.00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	246,786,000.00	140,250,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	173,818,000.00
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	41 unit	33,680,000.00	36,484,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	44,270,000.00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	309,022,700.00	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	762,384,000.00

						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**98%**	**98%**	**2,234,360,000.00**	**1,717,615,000.00**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**98%**	**2,557,708,000.00**
						Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan**	**100%**	**100%**	**1,805,861,000.00**	**1,325,888,000.00**	**Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan**	**100%**	**1,763,775,000.00**
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen	1 dokumen	234,076,500.00	225,224,500.00	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		0	-
						Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	43 berita acara	43 berita acara	197,110,500	72,017,500.00	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	43 berita acara	141,476,000.00
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	2 berita acara	735,147,000	557,102,000.00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 berita acara	916,813,000.00

						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	639527000	471,544,000.00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	705,486,000.00
						Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah**	**100%**	**100%**	**214,294,000**	**177,522,000.00**	**Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah**	**100%**	**606,236,000.00**
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	190 orang	450 orang	214,294,000	177,522,000.00	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	450 orang	511,596,000.00

												Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	94,640,000.00
						Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan**	**100%**	**100%**	**214,205,000**	**214,205,000.00**	**Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan**	**100%**	**187,697,000.00**
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan	3 laporan	214,205,000	214,205,000.00	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan	187,697,000.00

						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**84,959,530**	**64,703,000.00**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**86,467,000.00**
							Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			46,272,000	**24,647,000.00**		**Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	28,016,000.00
							Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			123,538,000	**29,514,000.00**		**Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	30,984,000.00

						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	**15 PD**	**15 PD**	**84,959,530**	**64,703,000.00**	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	**15 PD**	**86,467,000.00**
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 dokumen	63 dokumen	19,510,030	16,213,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 dokume n	21,910,000.00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	3,364,000	3,364,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	2,157,000.00

						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	42 dokumen	42 dokumen	18,528,500	11,576,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	42 dokume n	6,600,000.00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	43,557,000	33,550,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	55,800,000.00
						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah Perangkat Daerah Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	**10 PD**	**10 PD**	**46,272,000**	**24,647,000.00**	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Perangkat Daerah Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaika n Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	**10 PD**	**28,016,000.00**

						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	49 dokumen	49 dokumen	5,610,000	2,855,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	49 dokumen	5,600,000.00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 laporan	7 laporan	19,800,000	2,980,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 laporan	6,840,000.00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	21 dokumen	21 dokumen	13,288,000	11,238,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	21 dokumen	8,976,000.00

						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 laporan	3 laporan	7574000	7,574,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 laporan	6,600,000.00
						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	**18 PD**	**18 PD**	**123,538,000**	**29,514,000.00**	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan**	**18 PD**	**30,984,000.00**
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	35 dokumen	35 dokumen	34,322,000	7,728,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	35 dokumen	10,323,000.00

						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 laporan	5 laporan	24,231,000	7,340,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 laporan	6,250,000.00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	91 dokumen	91 dokumen	32,353,000	7,340,000.00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	91 dokumen	6,996,000.00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	13 laporan	13 laporan	32632000	7,106,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	13 laporan	7,415,000.00

						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**346,104,000**	**303,153,000.00**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**286,590,000.00**
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief**	**50%**	**50%**	**346,104,000**	**303,153,000.00**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief**	**50%**	**286,590,000.00**
						Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/difasilitasi**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**16,792,000**	**7,141,000.00**	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/ difasilitasi**	**1 dokumen**	**6,915,000.00**

						Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 laporan	1 laporan	16,792,000	7,141,000.00	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 laporan	6,915,000.00
						Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Indeks inovasi daerah**	**54**	**54**	**329,312,000**	**296,012,000.00**	**Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Indeks inovasi daerah**	**56**	**279,675,000.00**
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 laporan	1 laporan	329,312,000	296,012,000.00	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 laporan	279,675,000.00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Bapelitbagda Kota Batam.

4.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2024 adalah:

a. Perubahan Renja Bapelitbangda Tahun 2024 mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan

prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaas dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026; dan

b. Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2024 menjadi pedoman Bapelitbangda dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bapelitbangda Tahun 2024 .

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Bapelitbangda dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri dan Sistem Monitoring, Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan (Semenanjung) Kota Batam;
b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
c. Meningkatkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024

NO.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	(6.)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten/ Kota		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
7.	Perumusan tujuan dan sasaran		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
8.	Penelaahan usulan masyarakat		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
9.	Perumusan kegiatan prioritas		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota				
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan				
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota				

NO.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	(6.)
	disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota		√	Bukan merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang telah disahkan	√			

Batam, 26 Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan dan
Penelitian Pengembangan
Pembangunan Daerah Kota Batam

Dahlina Nopilawati, S.T
Pembina Tk.I
NIP. 19751121 200212 2 004